

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Ekonomi Politik**

Ilmu Ekonomi Politik, sebagai bagian dari ranah ilmu sosial, berasal dari dua subdisiplin utama, yaitu politik dan ekonomi. Proses pembelajaran Ilmu Ekonomi Politik memiliki karakteristik interdisipliner, menggabungkan dua disiplin ilmu yang dapat digunakan untuk menganalisis isu-isu sosial lainnya dengan fokus pada isu-isu ekonomi politik. Penelitian ini mengulas dua jenis ilmu, yaitu ilmu politik dan ilmu ekonomi, yang digabungkan menjadi satu kajian Ilmu Ekonomi Politik. Studi ini memusatkan perhatian pada fenomena ekonomi secara umum, yang selanjutnya diperinci untuk menyoroti interaksi antara faktor-faktor ekonomi dan politik. (J. Rachbini, 2002)

Dalam perkembangan selanjutnya, istilah ekonomi politik senantiasa merujuk pada adanya keterkaitan antara aspek ekonomi dan politik. Kelemahan instrumen ini mendorong upaya penyatuan pandangan dari berbagai pihak, di mana para ilmuwan berusaha mempertemukan titik temu dan mengkaji hal tersebut dengan pendekatan-pendekatan dalam ekonomi politik. Dalam usaha memperluas pemahaman tentang ekonomi politik, penting juga untuk memperhitungkan sistem ekonomi di negara yang bersangkutan. (J. Rachbini, 2002)

Seperti yang umumnya diketahui, istilah "ekonomi" berasal dari bahasa Yunani, yaitu "*oikosnomos*" atau "*oikonomia*," yang mengandung arti manajemen urusan rumah tangga, khususnya dalam konteks penyediaan dan administrasi pendapatan. Istilah ini terbentuk dari dua kata, yaitu "*oikos*" yang merujuk pada keluarga atau

rumah tangga, dan "*nomos*" yang artinya peraturan, aturan, dan hukum. Secara sederhana, ekonomi merujuk pada tata cara menyelenggarakan rumah tangga. Ilmu Ekonomi, pada dasarnya, adalah studi tentang perilaku manusia dalam menggunakan sumber daya yang terbatas untuk memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan. Ruang lingkup ekonomi mencakup aspek-aspek seperti konsumsi, produksi, dan distribusi. (Scott, 2005)

Sementara itu, dalam bahasa Yunani, istilah "sistem ekonomi politik" terdiri dari kata "*Oikonomike*" dan "*Polis*," yang secara umum mencerminkan keterkaitan erat antara faktor produksi, keuangan, dan perdagangan dengan kebijakan pemerintah di bidang moneter, fiskal, dan komersial. Martin Staniland mengemukakan bahwa ekonomi politik menjelaskan interaksi sistematis antara aspek ekonomi dan politik. Hubungan ini dapat dijelaskan dalam berbagai cara, baik melalui kausalitas antara proses-proses yang bersifat deterministik, resiprositas (imbang balik), atau sebagai suatu proses perilaku yang berlangsung terus menerus. (Scott, 2005)

Menurut Robert Dahl dan Charles Lindblom dalam bukunya "*Politics, Economics, dan Welfare*" tahun 1953, terdapat keterkaitan antara fenomena ekonomi dan politik yaitu:

1. Terdapat perbedaan pandangan antara ekonomi konvensional dan ekonomi politik, terutama dalam konteks interaksi ekonomi politik pada era modern.
2. Perbedaan muncul antara ekonomi politik klasik dan ekonomi politik modern yang terkait dengan dinamika hubungan antara pasar, kebijakan pemerintah, dan dampaknya pada masyarakat yang terlibat.

3. Terdapat kebingungan antara konsep ekonomi politik dan studi ekonomi pembangunan.
4. Dalam analisis berbagai permasalahan, ekonomi politik tidak hanya mengandalkan pendekatan kuantitatif, tetapi juga memanfaatkan teori-teori atau alat analisis dari disiplin ilmu sosial lainnya.
5. Ekonomi politik digunakan untuk membahas beragam masalah sosial yang berkaitan dengan kegiatan perekonomian. Ekonomi politik modern khususnya menyoroti isu ketidakadilan terkait dengan pemerataan pendapatan, kemiskinan, pertumbuhan, dan struktur ekonomi, baik dalam konteks nasional maupun internasional. (Suharto, 2008)

Adam Smith, seorang tokoh ekonomi politik, menggambarkan ekonomi politik sebagai cabang ilmu negarawan atau legislator dengan tujuan utama:

1. Menciptakan sumber pendapatan bagi masyarakat
2. Menyediakan daya dukung bagi negara agar dapat melaksanakan berbagai tugas dan fungsinya. (Suharto, 2008)

Ahmad Erani Yustika mengidentifikasi tiga varian utama dalam pendekatan ekonomi politik, yaitu ekonomi politik klasik/neoklasik (*classical/neoclassical political economy*), ekonomi politik Keynesian (*Keynesian political economy*), dan ekonomi politik Marxian (*Marxian political economy*). Secara ringkas, ekonomi politik klasik atau neoklasik menitikberatkan pada pasar atau kapitalisme sebagai landasan. Di sisi lain, ekonomi politik Keynesian mengadopsi teori ekonomi J.M. Keynes yang memperbolehkan campur tangan negara saat terjadi krisis ekonomi.

Sedangkan, ekonomi politik Marxian menggambarkan suatu sistem perekonomian yang sepenuhnya dikendalikan oleh negara. (Masykuroh, 2019)

Adapun paradigma sistem ekonomi politik secara umum dapat diidentifikasi dalam empat bentuk sistem ekonomi politik yang dominan, yaitu Kapitalisme, Sosialisme, Komunisme, dan campuran. Secara sederhana, dapat dijelaskan dalam bentuk persamaan berikut:

**Tabel 4 Sifat Dasar Ekonomi Politik Dalam Berbagai Sistem Perekonomian**

No	Sifat Dasar	Kapitalisme	Sosialisme	Komunisme	Campuran
1	Sifat dasar kepemilikan	Individu	Industri dasar dimiliki negara, sisanya individu	Seluruhnya dimiliki negara	Individu dan negara
2	Sifat dasar dalam inisiatif pembentukan badan usaha	Individu Partnership Korporasi	Usaha bersama pada industri dasar dan individu lainnya	Negara	Individu dan negara
3	Insentif ekonomi	Keuntungan sebagai motif utama	Motif ekonomi dan non ekonomi	Insentif terbatas	Ekonomi, sosial, politik, dll
4	Mekanisme pembentukan harga	Pasar (S&D)	Pemerintah, birokrasi	Negara	Birokrasi hukum pasar
5	Kompetisi atau persaingan	Eksis	Ada, bila negara mau	Tidak ada	Antara ada dan tiada
6	Struktur organisasi	Desentralistik	Semi sentralisasi	Sentralisasi penuh	Desentralisasi
7	Jenis insentif / dorongan	Materialistik	Sosialistik	Untuk ideologi	Gabungan

*Sumber : Didik J. Rachbini, 1996*

Sistem ekonomi campuran, yang juga dikenal sebagai "*Mixed economy*," merupakan pandangan yang mencoba menggabungkan unsur-unsur dari dua bentuk sistem ekonomi utama, yaitu sosialisme dan kapitalisme. Upaya penyatuan ini bertujuan untuk menyerap aspek-aspek yang dianggap positif dan dinamis dari keduanya, dengan tujuan untuk meninggalkan unsur-unsur yang dianggap lemah dari kedua sistem ekonomi politik tersebut. Sejarah pertentangan yang bahkan tidak harmonis antara kapitalisme dan sosialisme telah mendorong pemikiran untuk menciptakan suatu struktur ekonomi yang memiliki ciri khas, menggabungkan elemen terbaik dari keduanya. (Masykuroh, 2019)

Kedua bentuk ekstrem dari sistem ekonomi ini sebenarnya telah menuju ke arah sistem campuran karena keduanya berusaha untuk mengatasi kelemahan masing-masing, sehingga hanya unsur-unsur yang dinamis dan positif yang tetap. Sebagaimana diungkapkan oleh Hegel, perbaikan dan perkembangan pemikiran terjadi melalui proses dialektik menuju suatu sintesa, yaitu penyatuan tesha dengan antitesha dalam untuk mencapai kedinamikaan. Negara yang sedang berkembang percaya bahwa mengatasi ketertinggalannya dapat dilakukan dengan tidak mengadopsi secara eksklusif bentuk ekstrim dari kedua sistem ekonomi tersebut, melainkan dengan menyerap unsur-unsur dinamis dari keduanya. (Masykuroh, 2019)

Meskipun motif mencari keuntungan dianggap sebagai elemen kunci dalam kegiatan ekonomi dan produksi, sistem ekonomi campuran menyatakan bahwa keuntungan bukanlah segalanya, sebagaimana ditekankan dalam sistem ekonomi kapitalisme. Tanpa motif keuntungan, usaha akan kurang dan pertumbuhan

ekonomi akan melambat, tetapi juga diakui bahwa menekan dan mematikan motif ini, seperti yang terjadi dalam sistem ekonomi komunis, akan menghambat pertumbuhan. Sistem ekonomi campuran tetap berakar pada prinsip pasar, namun diatur oleh aturan pemerintah. Teori ekonomi politik campuran adalah konsep yang menjelaskan sistem ekonomi yang mengintegrasikan aspek-aspek dari sistem ekonomi pasar dan sistem ekonomi komando. Sistem ekonomi pasar berfokus pada mekanisme pasar, sementara sistem ekonomi komando bergantung pada perencanaan pusat. Sejarah teori ekonomi politik campuran dapat dilacak kembali ke masa Depresi Besar pada tahun 1930-an. Krisis ekonomi tersebut menunjukkan bahwa sistem ekonomi pasar yang sepenuhnya tidak mampu mengatasi masalah-masalah ekonomi kompleks, seperti pengangguran dan kemiskinan. Hasilnya, muncul gagasan perlunya peran lebih aktif dari pemerintah dalam mengelola ekonomi. (Masykuroh, 2019)

Mas'ood (1989:18) memiliki pandangan bahwa ekonomi dan politik saling terkait karena keduanya melibatkan kekayaan dan kekuasaan. Hubungan antara politik dan ekonomi dapat dipahami sebagai interaksi antara kekuasaan dan kekayaan. Dalam konteks politik, penelitian umumnya mempengaruhi arah kegiatan ekonomi untuk memenuhi kepentingan kelompok yang dominan. Ini menunjukkan bahwa penerapan kekuasaan memainkan peran penting dalam menentukan sifat suatu sistem ekonomi. Di sisi lain, proses ekonomi sering kali berdampak pada redistribusi kekayaan dan kekuasaan, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi struktur politik dan dinamika hubungan ekonomi.

Pembentukan dan redistribusi kekayaan dan kekuasaan secara lebih mendalam, analisis Mas'ood (1989:17) menekankan pentingnya mempertimbangkan nilai, kepentingan, dan kekuasaan dalam ekonomi politik. Pertama, nilai memainkan peran kunci dalam menentukan apakah proses ekonomi lebih didasarkan pada persaingan atau kerjasama. Perspektif nilai yang menekankan persaingan akan mengutamakan efisiensi pasar, mendorong penghargaan terhadap produktivitas, dan menganggap ketimpangan sebagai sesuatu yang tak terhindarkan. Di sisi lain, pendekatan nilai yang menekankan kerjasama akan menekankan pemerataan kesejahteraan dan memberikan perhatian kepada tingkat bawah. Sebaliknya, pendekatan nilai yang menekankan kerjasama berfokus pada pemerataan kesejahteraan dan inklusi sosial. Pendekatan ini mengedepankan prinsip bahwa kerjasama antar berbagai aktor dalam masyarakat dapat menghasilkan distribusi kesejahteraan yang lebih merata dan mengurangi ketimpangan. Hal ini sering melibatkan intervensi pemerintah atau kerjasama publik-swasta untuk mencapai tujuan sosial yang lebih luas, seperti redistribusi kekayaan dan perlindungan sosial bagi kelompok yang rentan.

Nilai juga mempengaruhi kebijakan ekonomi yang diadopsi oleh pemerintah. Perspektif yang menekankan persaingan mendukung kebijakan yang memfasilitasi pasar bebas, deregulasi, dan privatisasi, dengan harapan bahwa mekanisme pasar akan secara otomatis mengalokasikan sumber daya dengan cara yang paling efisien. Di sisi lain, perspektif yang menekankan kerjasama mendukung intervensi pemerintah dalam bentuk program-program sosial, subsidi, dan regulasi untuk memastikan bahwa keuntungan ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan

masyarakat, bukan hanya segelintir orang yang memiliki kekuatan ekonomi lebih besar. (Mochtar Mas' oed, 2001)

Menurut Mochtar Masoed, ekonomi politik adalah suatu cabang ilmu sosial yang mempelajari interaksi antara bidang ekonomi dan bidang politik. Dalam pandangan ini, ekonomi politik membicarakan kekayaan dan berbagai upaya yang dilakukan oleh manusia demi memenuhi hasrat dan keinginannya. Dengan sudut pandang yang lebih sempit, kebijakan ekonomi adalah kajian terkait relasi sosial, terutama relasi kekuasaan yang membentuk distribusi, produksi, dan sumber daya komunikasi .

Nilai ini terkait dengan sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip persaingan bebas. Di bawah nilai ini, pasar beroperasi tanpa campur tangan pemerintah secara signifikan. Beberapa karakteristik nilai persaingan bebas:

- Swasembada: Pasar mengatur produksi dan distribusi barang dan jasa tanpa campur tangan pemerintah.
- Kebebasan Ekonomi: Individu dan perusahaan memiliki kebebasan untuk berinovasi, berinvestasi, dan berdagang.
- Efisiensi: Pasar bebas dianggap efisien karena mengarah pada alokasi sumber daya yang optimal.

Karakteristik Nilai Kerjasama (*Collaboration Value*):

- Nilai ini menekankan peran pemerintah dan kerjasama antara sektor publik dan swasta dalam mengatur ekonomi. Pemerintah memiliki peran aktif dalam mengatasi ketidakseimbangan dan memastikan kesejahteraan sosial.

- Intervensi Pemerintah: Pemerintah mengatur pasar melalui kebijakan fiskal, moneter, dan regulasi.
- Redistribusi: Nilai ini menekankan pada keadilan sosial dan distribusi yang lebih merata.
- Stabilitas: Pemerintah berusaha menjaga stabilitas ekonomi <sup>6</sup>.

Salah satu tokoh yang relevan dalam membahas konsep nilai dalam ekonomi politik adalah Karl Marx. Marx mengartikan nilai sebagai representasi dari tenaga kerja yang dibutuhkan untuk memproduksi suatu barang atau jasa. Konsep ini dikenal sebagai “nilai tenaga kerja” (*labor theory of value*), yang merupakan dasar dari analisis ekonomi politik Marx. Menurut Marx, nilai suatu komoditas ditentukan oleh jumlah total waktu kerja yang diperlukan untuk menghasilkan komoditas tersebut. Ini termasuk waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh bahan baku, memprosesnya, dan menyiapkan produk akhir untuk konsumsi. Nilai tenaga kerja ini mencerminkan biaya sosial dari produksi dan menjadi dasar untuk memahami dinamika kapitalisme, di mana surplus nilai yang dihasilkan oleh pekerja dieksploitasi oleh pemilik modal untuk memperoleh keuntungan. Seperti yang dijelaskan oleh Marx:

*“The value of a commodity is determined by the quantity of socially necessary labor time required to produce it” (Marx, 1867, “Das Kapital”).*

Nilai dalam konteks ekonomi politik tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi semata, tetapi juga mencakup dimensi sosial dan politik. Hal ini mencakup bagaimana nilai tersebut diproduksi, didistribusikan, dan dikonsumsi dalam

masyarakat. Nilai juga berkaitan erat dengan kekuasaan dan kepentingan, di mana nilai atas proses produksi dan distribusi nilai sering menjadi sumber konflik politik.

Kedua, kepentingan menyoroti siapa yang mendapat manfaat dan siapa yang dirugikan dalam proses ekonomi. Kepentingan mencakup motivasi individu, kelompok, atau negara dalam mengambil keputusan ekonomi dan politik. Dalam pandangan Mochtar Masoed, kepentingan adalah faktor sentral yang memengaruhi dinamika ekonomi politik. Beberapa indikator kepentingan meliputi:

- Pengambilan Kebijakan: Bagaimana kebijakan ekonomi dan politik dibentuk dan diimplementasikan. Kepentingan berperan dalam menentukan arah kebijakan.
- Lobi dan Pengaruh: Bagaimana kelompok-kelompok tertentu mempengaruhi kebijakan melalui lobi, kampanye, dan hubungan dengan pejabat pemerintahan.
- Distribusi Sumber Daya: Bagaimana sumber daya dialokasikan dan didistribusikan. Kepentingan pemilik modal, korporasi, dan masyarakat memainkan peran penting dalam hal ini.

Kepentingan ekonomi melibatkan upaya mencapai keuntungan finansial, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas. Kepentingan politik berkaitan dengan memperoleh kekuasaan, mempertahankan posisi, dan memengaruhi kebijakan. Sedangkan pada kelompok-kelompok seperti korporasi, serikat pekerja, dan organisasi masyarakat memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Individu juga memiliki kepentingan pribadi yang memengaruhi keputusan ekonomi dan politik. Harold Lasswell, seorang ilmuwan politik, menyatakan bahwa politik pada

dasarnya adalah tentang “siapa mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana” (Lasswell, 1936). Dalam konteks ini, kepentingan merujuk pada apa yang diinginkan oleh aktor politik dan ekonomi dalam distribusi kekuasaan dan sumber daya.

David Ricardo, seorang ekonom politik klasik, menambahkan bahwa kepentingan ekonomi terutama didorong oleh keuntungan yang dapat diperoleh dari produksi dan perdagangan. Ricardo menekankan pada bagaimana distribusi pendapatan di antara kelas-kelas ekonomi dipengaruhi oleh mekanisme pasar dan kebijakan ekonomi (Ricardo, 1817). Dengan menggabungkan pandangan Lasswell dan Ricardo, kepentingan dalam ekonomi politik mencakup baik aspek politik (distribusi kekuasaan dan sumber daya) maupun aspek ekonomi (distribusi kekayaan dan keuntungan).

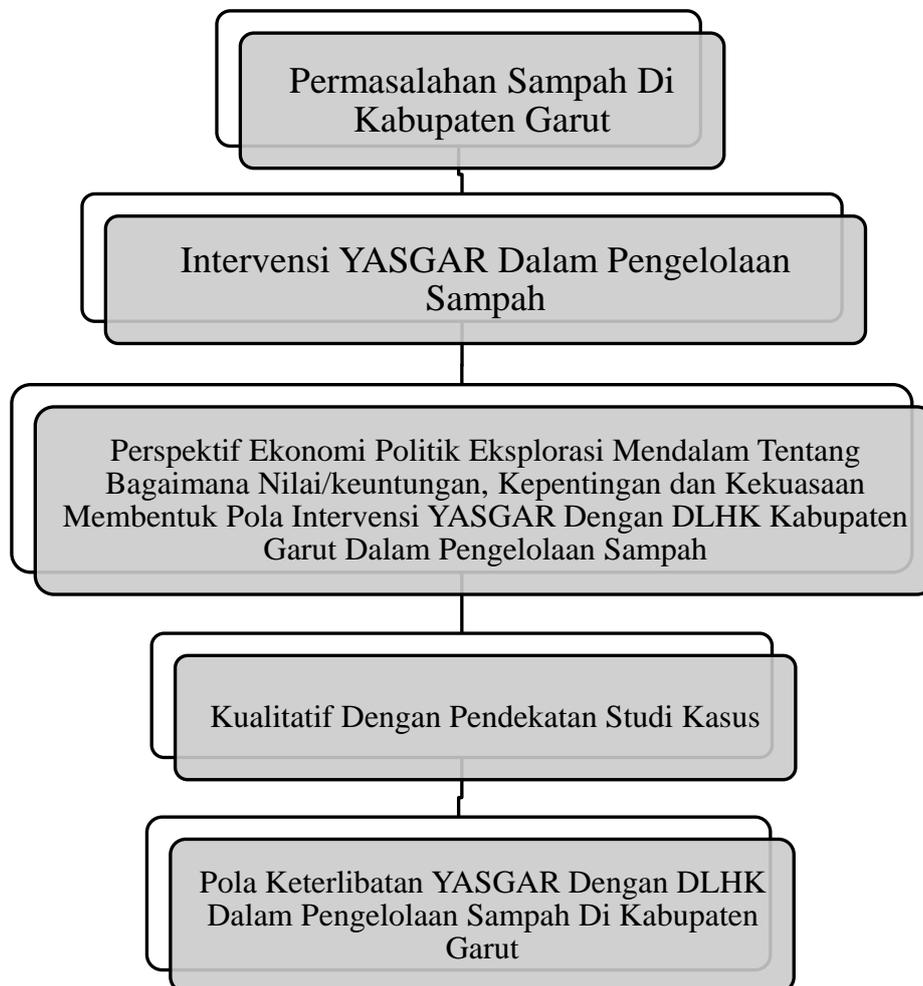
Terakhir, kekuasaan merupakan variabel penting yang harus dipertimbangkan dalam analisis ekonomi politik. Kekuasaan dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk menggunakan berbagai sumber daya (baik finansial material maupun kemampuan) guna memperoleh kepatuhan atau kerjasama dari pihak lain. Esensinya, kekuasaan bersifat relasional, yang berarti bahwa kekuasaan selalu melibatkan interaksi antara pihak-pihak yang terlibat. Sumber daya yang dimiliki harus diatur sedemikian rupa berasal dari kata “organum,” yang berarti alat untuk mencapai tujuan tertentu (Mas’oed, 2001). Hal ini mencakup pertanyaan tentang siapa yang memiliki kekuasaan, dari mana sumber kekuasaannya berasal, dan bagaimana kekuasaan tersebut memengaruhi nilai dan kepentingan yang didukung. Kekuasaan dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk menggunakan berbagai

sumber daya (baik finansial material maupun kemampuan) guna memperoleh kepatuhan atau kerjasama dari pihak lain. Esensinya, kekuasaan bersifat relasional, yang berarti bahwa kekuasaan selalu melibatkan interaksi antara pihak-pihak yang terlibat. Sumber daya yang dimiliki harus diatur sedemikian rupa berasal dari kata "*organum*," yang berarti alat untuk mencapai tujuan tertentu (Mas'ood, 2001).

## 2.2 Penelitian Terdahulu

	<b>Tahun</b>	<b>Peneliti</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Persamaan Penelitian</b>	<b>Perbedaan Penelitian</b>
1	2022	Muhammad Wahyudi	Relasi Pemerintah-Gerakan Sosial: Studi pada Gerakan Lingkungan Jelantah4Change	Studi ini juga menggunakan pendekatan kualitatif dan memiliki fokus kajian lingkungan pengelolaan sampah	Fokus penelitian ini adalah pada gerakan lingkungan Jelantah4Change
2	2021	Hasbi Shiddiq Fauzan	Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Kabupaten Garut	Penelitian ini juga membahas pengelolaan sampah di Kabupaten Garut	Fokus penelitian ini adalah pada implementasi kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga
3	2017	Annisa Suciati	Kebijakan Publik dan partisipasi Masyarakat (Implementasi Perda No 15 tahun 2011 tentang pengelolaan sampah di Kota Bekasi terhadap TPA Sumur Batu)	Penelitian ini juga membahas tentang pengelolaan sampah.	Lokus penelitian ini berada di Kota Bekasi, fokus penelitian pada implentasi kebijakan

### 2.3 Kerangka Pemikiran



**Gambar 1 Kerangka Pemikiran**

Penelitian ini mengeksplorasi permasalahan serius yang terkait dengan pengelolaan sampah di Kabupaten Garut. Dengan latar belakang volume sampah harian yang tinggi dan dampaknya yang merugikan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menyusun landasan pemecahan masalah melalui intervensi YASGAR. Intervensi YASGAR dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Garut tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga praktis. Melalui pendekatan ekonomi politik, penelitian ini menggali lebih dalam tentang bagaimana kepentingan, nilai/keuntungan, serta

kekuasaan membentuk pola intervensi YASGAR. Analisis ini memfokuskan pada program dan inisiatif yang dijalankan oleh YASGAR, seperti Bank Sampah dan berbagai kegiatan edukasi lingkungan yang didalamnya menghasilkan nilai ekonomis.

Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan studi kasus, penelitian ini memperoleh pemahaman mendalam tentang dinamika intervensi YASGAR. Fokusnya pada YASGAR sebagai studi kasus bukan hanya bertujuan untuk menggambarkan keunikan intervensi ini, tetapi juga untuk menganalisis dampaknya dengan lebih rinci. Pemilihan studi kasus YASGAR menjadi relevan karena keberhasilannya dalam merespons masalah sampah dan memberikan inspirasi untuk solusi di tingkat lokal.

Salah satu aspek utama dalam penelitian ini adalah kerjasama YASGAR dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dalam pengelolaan sampah. Kerjasama ini bukan hanya sebatas koordinasi, tetapi melibatkan sinergi antara YASGAR dan DLH untuk mencapai tujuan pengelolaan sampah yang berkelanjutan di Kabupaten Garut. Keseluruhan penelitian ini memberikan wawasan holistik terhadap permasalahan sampah, intervensi YASGAR, dan kerjasama antarlembaga yang krusial untuk mencapai tujuan keberlanjutan.